

## DAFTAR PUSTAKA

Data Laporan Kegiatan Inspeksi Jalan Tahun 2016.

Hadi, Soetrisno (2001), Metodologi Research, Yogyakarta. Andi

Jurnal : A. Ekasari (2014), Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha di Kota Depok.

Jurnal : Astuti.W (2008), Pengaruh Perilaku Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru.

Jurnal : Heru Fatamorgana (2014) Analisa Pengawasan Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman Kota Tanjung Pinang Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Tanjung Pinang Tahun 2013.

Jurnal : Irsan<sup>1</sup>. Abdul Razak<sup>3</sup>. Marthen Arie<sup>2</sup> (2015) Izin Mendirikan Bangunan Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Jayapura.

Jurnal : Mc. Anisah (2014), Analisis Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Jurnal : Muhammad (2015), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu (KPPT).

Jurnal : NS. Enggarani (2016), Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan.

Jurnal : R. Wibowo (2012), Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha di Kota Depok.

Jurnal : SE. Mandala Herefa (2016), Kendala Implementasi dan Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan.

Kegiatan Konsultan Koordinator Implementasi (KKI) Perda Bangunan Gedung Tahun 2016 : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan.

Muchsan (2010).Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia .Jurnal Yudisial,4(2):337-352;

Pasbana.com (2016) : Dinas PU Padang Panjang : Bangunan yang Melanggar Aturan, Tak Akan Dapat IMB

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.

Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang Panjang.

Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung Kota Padang Panjang.

Permen PU / /PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Permen PUPR Nomor 5 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sutedi,Adrian (2011).Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,Jakarta:Sinar Grafika.

Tesis : I. Mallidin (2011), Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang